

BAB I PENDUHLULUAN

1.1. Latar belakang

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat dan daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktifitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya (Arifin,2012)

Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak untuk menuntut pertanggung jawaban. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi yang di terapkan selama ini. Sistem yang dimaksud jika dikaitkan dengan kondisi sekarang ini adalah sistem informasi keuangan publik pemerintah. Dengan demikian faktor yang ikut menentukan kinerja keuangan daerah adalah peran akuntansi keuangan publik sebagai faktor konstekstual atau situasional

Sasongko, 2010, anggaran adalah ekspresi kuantitatif dari rencana tindakan yang diusulkan oleh menejemen untuk jangka waktu yang akan datang untuk koordinasi dan pelaksanaan rencana. Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran.

Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran. Kemudian, anggaran juga menjelaskan koordinasi antar bagian dalam perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai (Sasongko, 2010). Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan monter yang menggunakan dana milik rakyat.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Safrizal dan Hazmi (2012) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran dan karakteristik informasi akuntansi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di kota hasilnya adalah bahwa interaksi partisipasi anggaran dan informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Yandra Dkk (2014) meneliti tentang pengaruh

kompetensi individu, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai sekertariat daerah kabupaten kerinci. Hasilnya terdapat pengaruh yang signifikan positif budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai sekertariat daerah kabupaten kerinci. Suhardini, Dkk (2014) meneliti tentang sistem teknologi informasi terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah daerah provinsi riau). Hasilnya sistem teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. Pamungkas (2012) meneliti tentang pengaruh pemerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan.

Anggaran sektor publik merupakan suatu instrumen perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas publik yang ditandai adanya penentuan visi misi, tujuan, sasaran, dan target terikat atau organisasi publik serta adanya penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan suatu proses kinerja organisasi birokrasi. Sehingga, penganggaran sektor publik merupakan aktivitas yang meliputi perencanaan, ratifikasi, implementasi dan pertanggung jawaban dalam organisasi sektor publik untuk meningkatkan kinerja organisasi birokrasi dan keberhasilannya tergantung pada kerjasama dalam sistem tersebut. Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan uu no. 12 tahun 2008, manajemen keuangan daerah pemerintah kabupaten kulon progo

mengalami perubahan sistem anggaran dari model tradisional (*traditional budget system*) menjadi model anggaran berbasis kinerja (*performance budget system*). Sistem anggaran tradisional bersifat tersentralisasi yaitu penyusunan anggaran yang dilakukan secara terpusat, tidak adanya tolok ukur penilaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya akan memunculkan *budget padding* atau *budgetary slack*.

Sistem penganggaran *topdown*, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan sehingga atasan/pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan dengan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Oleh karena itu, entitas mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat menanggulangi masalah di atas yakni sistem penganggaran partisipatif (*participative budgeting*).

Melalui sistem ini, bawahan/pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga tercapai kesepakatan antara atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut.

Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat

meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Nor,2017).

Laporan keuangan yang di sajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat di jadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik sehingga dapat terlihat berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya. Tujuan pelaporan keuangan umumnya untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Akuntabilitas public sangat penting untuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Tingginya tuntutan para stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggung jawaban secara periodik (Setiawan Dkk, 2017).

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Akuntansi pemerintah daerah atau yang disebut juga dengan akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan

informasi dalam rangka pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan dalam hal ini fenomena yang terjadi, dalam sistem akuntansi keuangan daerah sudah baik, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan dalam hal pencatatannya yang masih menggunakan *single entry*

Sistem akuntansi tidak saja berfungsi sebagai alat pengendali transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja pada sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya

Akuntansi merupakan seni mencatat, seni mengolongkan, dan mengiktisarkan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermaknadan dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasil-hasilnya jadi akuntansi merupakan seni mencatat, seni mengidetifikasi seni meringkas dan seni mengolongkan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan selama satu periode dalam melaporkan keuangan dalam suatu perusahaan selama satu periode.

“pengaruh partisipasi anggaran dan pengetahuan akuntansi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan didinastenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur?
2. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur?
3. Apakah partisipasi anggaran dan pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan pengetahuan akuntansi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian “**pengaruh partisipasi anggaran dan pengetahuan akuntansi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur**”

a. Bagi Instansi Pemerintah

1. Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama antara instansi dengan perguruan tinggi dimasa yang akan datang, khususnya mengenai rekrutmen tenaga kerja
2. Sebagai wadah sarana kerja sama antara pemerintah dengan pendidikan sebagai sumber informasi dan masukan yang dapat digunakan untuk perguruan tinggi dan instansi pemerintah di masa yang akan datang
3. Memberikan bahan masukan dalam mewujudkan program kerja dan merencanakan perbaikan kegiatan pada periode berikutnya serta meningkatkan kinerja organisasi untuk membentuk lembaga yang bersih.

b. Bagi universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1. Perguruan tinggi akan lebih siap dalam proses pendidikan untuk berintegrasi antara mahasiswa dengan praktisi lapangan sehingga kurikulum perguruan tinggi dapat di sesuaikan dengan kebutuhan
2. Merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak fakultas dengan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas, keterserapan, dan memanfaatkan lulusan di masyarakat dan dunia kerja
4. Mendukung visi, misi, dan tujuan program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas PGRI adibuana surabaya
5. Mendukung pelaksanaan standarisasi kompetensi lulusan

c. Bagi mahasiswa

- 1 Memiliki kemampuan yang lebih mendalam mengenai instansi yang di jadikan sebagai tempat penelitian
- 2 Tempat penelitian khususnya di bagian mana mahasiswa di tempatkan
- 3 Membuka wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya, baik dari segi kedisiplinan maupun pergaulan di dunia kerja.
- 4 Mampu mengenali potensi diri sendiri sehingga dapat menentukan pada jenis pekerjaan apa mahasiswa tersebut akan memanfaatkan ilmunya.
- 5 Memiliki program kegiatan yang jelas di buat apabila diterapkan pada dunia kerja sesungguhnya
- 6 Menerapkan ilmu yang di peroleh selama masa perkuliahan pada kegiatan yang nyata, dengan demikian akan mengetahui perbandingan antara pengetahuan di bangku kulia dengan kenyataan yang ada di dunia kerja
- 7 Memperdalam dan meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kreatifitas pribadi yang sesuai dengan ilmu yang di miliki
- 8 Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman
- 9 Menguji kemampuan pribadi yang sesuai dengan dengan ilmu yang di pelajari serta tatacara bersosialisasi dengan dunia kerja.